



UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN DAERAH BISA MENGHAMBAT ASPEK  
KEPASTIAN HUKUM BAGI KEGIATAN INVESTASI DI  
INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)

TESIS

SULASTRY MASNITA  
0706305620

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN DAERAH BISA MENGHAMBAT ASPEK  
KEPASTIAN HUKUM BAGI KEGIATAN INVESTASI DI  
INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum

SULASTRY MASNITA  
0706305620

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2010

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

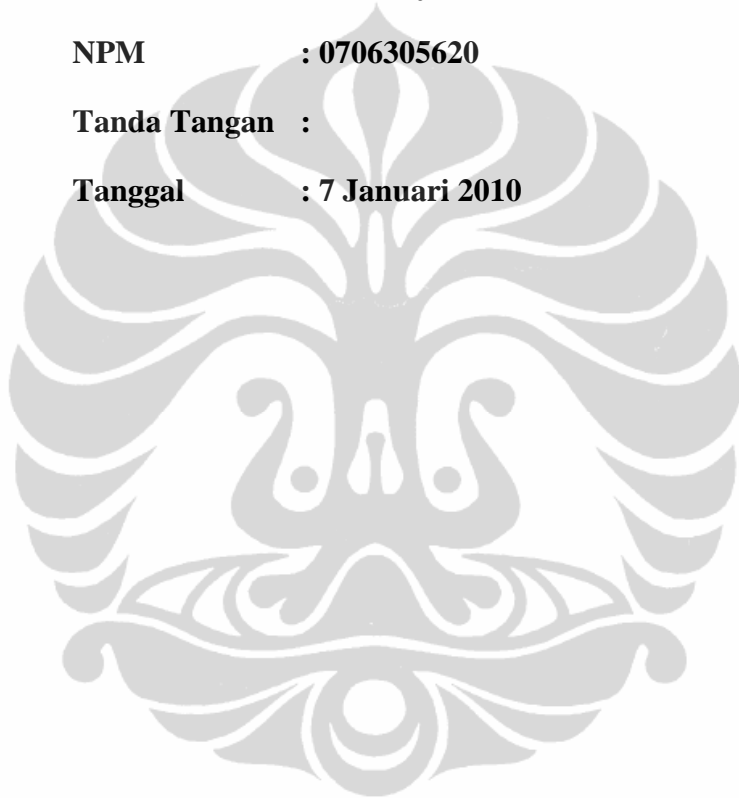
**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Sulastry Masnita**

**NPM : 0706305620**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Sulastry Masnita  
NPM : 0706305620  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peraturan Daerah Bisa Menghambat Aspek  
Kepastian Hukum Bagi Kegiatan Investasi Di  
Indonesia (Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  
Modal).

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M, Ph.D. (.....)  
Penguji : Dr. Nurul Ermiyah, SH., MH (.....)  
Penguji : Dr. Indra Surya, SH., LL.M (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2010

## HALAMAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulastry Masnita  
NPM : 0706305620  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peraturan Daerah Bisa Menghambat Aspek Kepastian Hukum Bagi Kegiatan Investasi Di Indonesia (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan

**(Sulastry Masnita)**

## ABSTRAK

Nama : Sulastry Masnita  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum UI  
Judul : Peraturan Daerah Bisa Menghambat Aspek Kepastian Hukum Bagi Kegiatan Investasi Di Indonesia (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), Tesis, Magister, ix + 85 halaman.

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 salah satu asas penanaman modal adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi iklim penanaman modal, dikarenakan terdapat hubungan antara hukum dengan kegiatan investasi, hubungan tersebut adalah mengenai bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan *certainty* (kepastian), *fairness* (keadilan), *efficiency* (efisien). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Peraturan daerah disadari menjadi instrument penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pada perkembangannya, ada kecenderungan sejumlah peraturan daerah dibuat semata-mata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang mengatur mengenai pungutan, khususnya pungutan yang berkaitan dengan dunia usaha. Pungutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah itu sendiri.

Kata kunci:

Kepastian Hukum, Investasi, dan Peraturan Daerah.

## ABSTRACT

Nama : Sulastry Masnita  
Study Program : Postgraduate  
Title : Local Regulation Aspects Can Impede Legal Certainty for investment activities in Indonesia (in the Perspective of Law Number 25 Year 2007 About Investing), Thesis, Master, ix + 85 pages.

This thesis uses the methods of normative legal research using secondary data consists of primary source legal materials, secondary source material and tertiary sources of materials. The problem in this thesis is how the Regional Regulations that discourage investment in Indonesia? How the juridical review of local regulations that impede investment activities in Indonesia based on Law Number 25 Year 2007 on Investment? To invest in Indonesia, the investors need legal assurance. In accordance with article 3 paragraph 1 (a) of Law Number 25 Year 2007 one of the investment principles is the principle of legal certainty. Legal certainty to be one of the aspects that affect the climate for investment, because there is a relation between the law with investment activities, the relationship is about how to create a law that could restore the confidence of foreign investors to invest in Indonesia by creating certainty (certainty), fairness (justice), efficiency (efficient). Since the implementation of regional autonomy, local regulations become important instrument in contributing to regional economic growth. However, in its development, there is a tendency of local regulations made solely for the purpose of contributing immediately in local revenue (PAD) which regulate the charges, especially charges related to the business world. Excessive charges and improper charges can be potential to distort business and investment climate in the region itself.

Keywords:

Legal Certainty, Investment, and Local Regulation

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Ekonomi- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat bantuan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Erman Rajagukguk, S.H. LL. M., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih Prof, telah menyediakan waktu disela-sela kesibukan selama membimbing saya.
2. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membekali penulis selama perkuliahan.
3. Seluruh staf sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI – terima kasih sudah membantu dan melayani dengan baik.
4. Alm. Ir. K. Situmeang dan M. Simamora, buat dukungan doa dan kasih sayangnya, serta untuk suamiku tercinta R. R. Hutasoit (terima kasih buat dukungannya selama Penulis mengerjakan tesis ini).
5. Rekan-rekan kantor dan kawan-kawan seperjuangan di Program Magister Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk kebersamaannya selama ini, dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang Hukum Penanaman Modal di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010

Penulis



## Daftar Isi

<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	10
3. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
5. Metode Penelitian .....	19
6. Sistematika Penulisan.....	20
<b>Bab II    Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi</b>	
<b>Di Indonesia.....</b>	<b>22</b>
1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan.....	22
2. Aparatur Hukum Yang Efisien dan Efektif.....	29
3. Budaya Hukum Yang Mendukung Tegaknya Hukum.....	43
<b>Bab III   Peraturan Daerah (Perda) Yang Menghambat</b>	
<b>Program Investasi.....</b>	<b>63</b>
1. Peraturan Daerah (Perda) Yang Bertentangan Dengan	
Yang Lebih Tinggi.....	66
2. Peraturan Daerah (Perda) Yang Tidak Sesuai Dengan	
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang	
Penanaman Modal.....	69
3. Peraturan Daerah (Perda) Yang Tidak Jelas.....	71
<b>Bab IV    Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>78</b>

1. Kesimpulan .....	78
2. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

